

# Kebijakan daerah dalam meningkatkan pemahaman kesehatan siswa melalui lembaga pelatihan dan edukasi

Dr. Y. Huang<sup>1</sup>, Dr. L. Zhou<sup>1</sup>, Dr. X. Deng<sup>1</sup>, Dr. Q. Gao<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> School of Public Health and Preventive Medicine, Chongqing Medical University, Chongqing, China

---

## Info Artikel

Keywords:  
Local Government,  
Cooperation, Course .

---

## Abstract

The aim of this study was to find out the policies undertaken by local governments in cooperation to improve the ability of English students of students through the Institute of Course, find out the obstacles and what efforts are made by the government in collaboration with course institutions.

The method used in this study was descriptive qualitative method. To collect the data, the researcher used observation, interview and documentation. The population in this study was the head of the education and culture department, the head of the non-formal education sector and its subordinates, as well as the leaders and students at the Institute of Course. The total of samples were 7 (seven) people.

The results of this study showed that the local government policies in cooperation to improve the ability of English students through English language courses was good but need to be improved. This could be seen from the collaboration carried out between the local government and the course in writing, it did not exist, but the cooperation established is in the form of a permit to establish a course. The obstacles in local government policy in cooperation to increase the improvement of students' English ability, namely regarding funds, distance traveled, and skills in conducting cooperation. The efforts made in overcoming these obstacles were the government provides equal opportunities to all course institutions in obtaining assistance, for assessors who are assigned to carry out direct assessments try to remain consistent in a predetermined schedule, and seek competent and good skilled teaching staff in terms of cooperation.

**Keywords:** Local Government, Cooperation, Courses.

---

## Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kerjasama peningkatan kemampuan Bahasa Inggris anak didik melalui Lembaga Kursus, mengetahui hambatan-hambatan dan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam kerjasama dengan lembaga kursus.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, kepala bidang pendidikan nonformal dan

bawahnya, serta pimpinan dan anak didik pada Lembaga Kursus. Jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 (tujuh) orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam kerjasama peningkatan kemampuan Bahasa Inggris anak didik melalui lembaga kursus Bahasa Inggris sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari kerjasama yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pihak kursus secara tertulis memang tidak ada, namun kerjasama yang terjalin yaitu berupa rekomendasi izin mendirikan kursus. Hambatan dalam kebijakan pemerintah daerah dalam kerjasama peningkatan kemampuan Bahasa Inggris anak didik yaitu mengenai dana, jarak tempuh, dan keterampilan dalam melakukan kerjasama. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu pemerintah memberikan kesempatan yang sama pada semua lembaga kursus dalam memperoleh bantuan, bagi petugas asesor yang mendapat tugas untuk melakukan penilaian langsung berupaya tetap konsisten dalam jadwal yang sudah ditentukan, dan mengupayakan tenaga pengajar yang berkompeten serta memiliki skill yang baik dalam hal kerjasama.

**Kata Kunci** : Pemerintah Daerah, Kerjasama, Kursus.

## 1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Oleh karena itu pembangunan pendidikan nasional merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia di Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berahlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Konsep pendidikan mengenal adanya tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan dalam masyarakat. Sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.<sup>1</sup> Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang. Pendidikan formal dan pendidikan nonformal sebenarnya satu sama lain telah saling melengkapi, namun hasil pendidikan formal (sekolah) dari berbagai jenjang yang kurang memiliki keterampilan dan harus dilengkapi dengan pendidikan kecakapan hidup/life skill agar dapat bersaing dan mempunyai pengalaman serta kemampuan yang dibutuhkan oleh instansi baik negeri maupun swasta atau mengembangkan usaha mandiri (wirausaha). Salah satu pendidikan nonformal yang ada di Indonesia adalah lembaga yang berbasis kecakapan hidup yaitu Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK).

Sihombing mendefinisikan kursus sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industry.<sup>2</sup>

Didalam pendidikan nonformal kursus Bahasa Inggris merupakan salah satu pendidikan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kompetensi

<sup>1</sup> Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>2</sup> U, Sihombing. *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Adicita Karya Nusa: Yogyakarta 2001

atau kemampuan berkomunikasi Berbahasa Inggris. Sebagai sarana komunikasi international Bahasa Inggris harus dikuasai secara aktif maupun pasif, lisan maupun tulisan, karena di era modern ini informasi dan teknologi menggunakan Bahasa Inggris.

Menghadapi tantangan tersebut maka masyarakat harus mempersiapkan diri untuk menjadi sumber daya manusia yang berpotensi terutama didalam bidang komunikasi yaitu dengan menggunakan Bahasa Inggris. Kebutuhan masyarakat akan pentingnya Bahasa Inggris tersebut mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam mempertajam skill (kemampuan) Berbahasa Inggris. Demikian juga bagi lembaga kursus Bahasa Inggris saling berlomba dalam menawarkan jasa kursus Bahasa Inggris. Oleh karena itu lembaga kursus juga harus memiliki kerjasama dengan pemerintah.

Kerjasama pemerintah dengan lembaga kursus bukan merupakan kerjasama yang harus memiliki tandatangan dari momerandum of understanding (MOU) atau kerjasama tertulis. Kerjasama yang dimaksudkan disini kerjasama berdasarkan kepentingan bersama untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris anak didik tanpa adanya perjanjian tertulis atau tanda tangan kontrak MOU. Pemerintah daerah hanya mengimplementasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pemberi izin bagi lembaga kursus yang akan menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris.

Di Kabupaten Bungo telah berdiri dan terdaftar beberapa tempat kursus Bahasa Inggris, seperti Monalisa, Bright A, Ganesha Operation, Prima Gama, dan Talenta Education Center yang mana pihak-pihak penyelenggaraan kursus tersebut telah mendapatkan surat izin mendirikan kursus dan menyelenggarakan kursus.

Kebijakan yang dibentuk antara pemerintah daerah dengan pihak lembaga kursus dalam menyelenggarakan peningkatan kemampuan anak didik yang berpedoman melalui Undang-Undang 20 Tahun 2003 yang terdapat pada Bab XIX tentang Pengawasan pasal 66 yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.<sup>3</sup>

Permasalahan yang dihadapi pada kebijakan pemerintah dalam kerjasama dengan lembaga kursus yang ada di Kabupaten Bungo guna peningkatan kemampuan anak didik yaitu sulitnya menerapkan hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga kursus dalam hal pengawasan dan penilaian terkait apakah lembaga kursus tersebut layak untuk diberikan izin dalam menyelenggarakan program kursus guna peningkatan kemampuan Bahasa Inggris anak didik.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;

Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam kerjasama peningkatan kemampuan Bahasa Inggris anak didik melalui lembaga kursus Bahasa Inggris? Apa hambatan kebijakan pemerintah daerah dalam kerjasama peningkatan kemampuan Bahasa Inggris anak didik melalui lembaga kursus Bahasa Inggris? Apa upaya kebijakan pemerintah daerah dalam kerjasama Peningkatan kemampuan Bahasa Inggris anak didik melalui lembaga kursus Bahasa Inggris?

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam kerjasama peningkatan kemampuan Bahasa Inggris anak didik melalui lembaga kursus Bahasa Inggris, untuk mengetahui hambatan kebijakan pemerintah daerah dalam kerjasama peningkatan kemampuan Bahasa Inggris anak didik melalui lembaga kursus Bahasa Inggris, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam kerjasama peningkatan kemampuan Bahasa Inggris anak didik melalui lembaga kursus Bahasa Inggris.

Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini dilakukan oleh Oswari,<sup>4</sup> Nunung Fajaryani,<sup>5</sup> Mardiana Asih Heningtiyas,<sup>6</sup> dan Yusrah Ubaid Salim<sup>7</sup> dimana peneliti tersebut

<sup>3</sup> Undang-Undang No.20 Tahun 2003, *Op Cit*

<sup>4</sup> Oswari, E.A. 2012. *Mengkaji Metode Pembelajaran Bahasa Inggris Mandiri dengan Free Virtual Online Course*. Ug Jurnal ISSN.

mengkaji tentang pendidikan nonformal terhadap penguasaan Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh pihak kursus, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu fokus pada pengembangan dan pendidikan non formal dalam peningkatan Bahasa Inggris, sedangkan penelitian ini fokus pada kebijakan dalam kerjasama untuk meningkatkan kemampuan anak didik melalui lembaga kursus Bahasa Inggris.

Menurut Charles O Jones dalam Rahayu Kusuma Dewi menyatakan bahwa kebijakan (Policy Term) digunakan dalam praktik sehari-hari, namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan, standar, proposal, dan grand design.

Abuddin mengatakan bahwa ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih yaitu terbuka dan saling mengerti.<sup>8</sup>

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.<sup>9</sup>

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisa menggunakan model interaktif yang mengacu pendapat Miles dan Huberman bahwa dalam analisis data kualitatif ada empat tahapan yang harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Anak Didik melalui Lembaga Kursus Bahasa Inggris.

Adapun kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna peningkatan kemampuan Bahasa Inggris anak didik melalui lembaga kursus Bahasa Inggris tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XV mengenai Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan dan Bab XVI tentang Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yaitu:

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

---

<sup>5</sup> Nunung Fajaryani, F.M. 2015. *Inovasi Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar dengan TALULAR*. Pengabdian pada Masyarakat.

<sup>6</sup> Murdiana Asih Heningtyas, S.M. 2017. *Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal*. Jurnal Administrasi Publik.

<sup>7</sup> Yusrah Ubaid Salim, S. W. 2017. *Analisis Minat Beli Konsumen terhadap Program Kursus Bahasa Inggris di lembaga Kursus Bahasa Northen Lights Education Center (NLEC)*. E-proceeding of applied Science.

<sup>8</sup> Abuddin Op Cit

<sup>9</sup> Sugiyono. 2000. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung

2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
3. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam proses penyelenggaraan kursus Bahasa Inggris tidak luput dari pantauan Dinas Pendidikan, seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional pada Bab XVI, Pasal 57 bagian kesatu adalah:

- a. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pemerintah dan pemerintahan daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Masyarakat dan atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan Formal, dan Nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Peningkatan Mutu Bahasa Inggris Anak Didik melalui Lembaga Kursus Bahasa Inggris dengan teori Kerjasama Jhonson adanya saling ketergantungan yang positif diantara Individu-individu dalam kelompok tersebut untuk mencapai tujuan dan adanya kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan pihak Kursus Bahasa Inggris untuk Peningkatan Kemampuan Anak Didik.

Pada kesempatan ini penulis mengajukan pertanyaan kepada Ibu Suryana selaku Kabid Pendidikan Nonformal (PNF) beliau mengatakan:

“... bentuk kerjasama yang kami lakukan dengan lembaga kursus Bahasa Inggris yaitu kerjasama dalam bentuk rekomendasi izin menyelenggarakan kursus. Melalui kementerian pendidikan untuk dapat memberikan izin bagi penyelenggara kursus dan pelolosan syarat-syarat administrasi yang selektif serta bantuan dana jika ada dana dari pusat untuk menyelenggarakan kegiatan maka pihak Dinas Pendidikan akan turun untuk memantau apakah lembaga kursus tersebut layak diberikan bantuan.

Berdasarkan uraian hasil wawancara diatas dengan ibu kabid tentang kerjasama dengan pihak lembaga kursus Bahasa Inggris, kerjasama yang terjalin hanya berupa rekomendasi izin mendirikan kursus. Selanjutnya pihak dinas melakukan pemantauan atau pengawasan, pada lembaga kursus yang diselenggarakan, serta penilaian terhadap tenaga pengajar.

Pada kesempatan yang sama penulis mewawancarai Bapak Masril selaku Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beliau juga mengatakan hal yang sama dengan ibu Suryana selaku kabid:

“...bahwa bentuk kerjasama pemerintah dengan lembaga kursus Bahasa Inggris yaitu dalam bentuk pemberian izin menyelenggarakan kursus, jika kursus tersebut sudah diselenggarakan maka pihak pemerintah harus melakukan pengawasan dan penilaian kurikulum serta metode yang diterapkan dalam proses ajar mengajar apakah metode tersebut tidak mengandung unsur pornografi kemudian dilanjutkan dengan penilaian terhadap tenaga pengajar, yang diutamakan untuk mengajar anak didik adalah minimal lulusan S1. Pak Masril juga mengatakan bentuk kerjasama lain dalam LKP adalah pihak kami ikut membantu untuk mempromosikan kehadiran lembaga tersebut, seperti mengimbau atau memberitahu masyarakat bahwa didaerahnya sudah berdiri tempat kursus Bahasa Inggris,

dengan cara menghadiri acara pembukaan kursus tersebut dengan mengundang bapak Bupati jika beliau memiliki waktu untuk menghadiri dan meresmikan proses pendirian kursus tersebut .

Untuk pertanyaan selanjutnya, indikator masalah yang ditanyakan oleh penulis berhubungan dengan teori kerjasama yang ada di poin 2 yaitu adanya interaksi tatap muka yang dapat meningkatkan sukses satu sama lain diantara anggota kelompok.

Apakah komunikasi dan interaksi yang baik juga diperlukan didalam melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga kursus Bahasa Inggris. Pada kesempatan ini penulis melakukan wawancara dengan Mr. Hendra Susanto selaku pimpinan Lembaga Kursus Bahasa Inggris Education Center, beliau juga mengatakan hal yang sama yang telah dijelaskan oleh Ibu Suryana dan Bapak Masril:

“... Bentuk kerjasama yang nyata dalam peningkatan mutu Bahasa Inggris Anak didik, sejauh ini hanya dalam bentuk proses prosedur administrasi untuk pengurusan izin menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris. Dalam kegiatan belajar mengajar, pihak pemerintah sampai sejauh ini belum pernah sama sekali melakukan kunjungan untuk penilaian les Bahasa Inggris yang saya jalankan. Tapi pihak pemerintah pernah mengadakan sosialisasi guna pengembangan kualitas tenaga pengajar, namun sangat disayangkan yang jadi juru bicara bukan dari bidang Bahasa Inggris melainkan dibidang kecantikan. Hal ini sangat bertolak belakang bagi tenaga pendidik Bahasa Inggris. Namun bagi bidang kursus kecantikan itu sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tenaga jasa kecantikan. Seharusnya pemerintah jika ingin melakukan sosialisasi harus memisah-misahkan bidang Lembaga Kursus, karena didalam LKP terdapat beberapa kursus lainnya, seperti kecantikan, taylor, tata boga dan lainnya.

### **3.2 Hambatan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Anak Didik melalui Lembaga Kursus Bahasa Inggris.**

Adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dan lembaga kursus Bahasa Inggris guna peningkatan kemampuan Bahasa Inggris anak didik berdasarkan teori Kerjasama Jhonson yaitu;

#### **1. Dana**

Jhonson menyatakan bahwa anggaran merupakan suatu dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan organisasi yang mencakup informasi keuangan, belanja, aktifitas, serta tujuan organisasi. Pada kesempatan ini penulis mengajukan pertanyaan kepada Bapak Masril selaku kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beliau mengatakan

“..... hambatan atau kendala yang kami hadapi adalah terbatasnya dana bantuan bagi penyelenggara kursus kerena, tidak semua lembaga kursus bisa memperoleh bantuan langsung dari pemerintah. Untuk apa banyak tempat kursus bahasa Inggris sementara yang minat hanya sedikit, sehingga menyebabkan tempat kursus tersebut mengalami kerugian, tidak bisa membayar gaji tenaga pengajarnya dan ini menyebabkan kemampuan anak didik tidak mengalami peningkatan Bahasa Inggris.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan salah satu staf bidang PNF yaitu Ibu Soprizal selaku Kasi Sarana dan Prasarana beliau mengatakan:

“..... adapun kendala yang dihadapi antara pemerintah dan pihak kursus yaitu disegi dana. Karena dana merupakan faktor salah satu dalam pengadaan sarana dan prasarana yang akan digunakan. Untuk sebuah tempat kursus Bahasa Inggris seharusnya mempunyai minimal satu buah earphone untuk belajar listening, serta 4 meja dan 10 kursi beserta papan tulis yang layak digunakan.

#### **2. Jarak Tempuh**

Jarak tempuh yang jauh juga merupakan salah satu kendala dalam kerjasama antara pemerintah dan pihak kursus dalam melakukan pengawasan dan penilaian pada tempat kursus yang berada didaerah yang memerlukan kendaraan dan dana operasional untuk

sampai disana. Penulis mengajukan pertanyaan kepada Bapak Masril selaku kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beliau mengatakan:

“.....bahwa, kami juga mengalami kendala disegi dana operasional bagi tim pengawasan dan penilaian pada LKP yang berada di daerah diluar jangkauan karena memerlukan dana bagi yang melaksanakan tugas pengawasan dan penilaian. Sementara dana untuk melakukan kegiatan tersebut tidak ada, sehingga ini menjadi penghambat bagi pemerintah untuk mengetahui perkembangan kursus tersebut.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Azra'i selaku Kasi Kurikulum dan Pengawasan, beliau mengatakan:

“.....bahwa hambatan yang sering kami alami dalam melakukan pekerjaan disegi penilaian dan pengawasan adalah jarak tempuh menuju lokasi tempat kursus yang akan diawasi dan dinilai karena hal ini memerlukan dana operasional untuk bisa menuju kesana, sementara dana untuk operasional tersebut tidak ada di dalam anggaran pengeluaran.

### 3. Keterampilan dalam melakukan kerjasama

Pendidikan merupakan salah satu modal utama yang perlu dipenuhi untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi. Kualitas modal manusia ini misalnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun lainnya. Oleh karena itu tenaga pengajar merupakan hal yang sangat penting dalam peningkatan kemampuan Bahasa Inggris Anak Didik. Namun kenyataanya sulit sekali untuk mendapatkan tenaga pengajar yang berkompeten dalam mengajar Bahasa Inggris Anak Didik untuk di daerah yang belum berkembang,

Dalam kesempatan yang sama penulis juga mewawancarai Bapak Azra'i selaku Kasi Kurikulum dan Penilaian, beliau mengatakan:

“.....bahwa dalam meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris anak didik tidak bisa lepas dari peran seorang guru. Di sini manusia yang terampil sangat kami butuhkan untuk peningkatan kemampuan Bahasa Inggris anak didik. Untuk itu kami menetapkan syarat standar bagi Lembaga Kursus Bahasa Inggris yang menyelenggarakan kursus harus merekrut guru minimal S1 dan dibekerjakan sesuai dengan latar belakang pendidikanya agar ilmu yang disampaikan pada anak didik tidak melenceng dari background pendidikannya.

### 3.3 Upaya Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Anak Didik Melalui Lembaga Kursus Bahasa Inggris.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan kebijakan pemerintah daerah dalam kejasama peningkatan kemampuan Bahasa Inggris anak didik melalui lembaga kursus Bahasa Inggris adalah:

1. Dalam pemberian Bantuan Dana dari pemerintah pusat seharusnya Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama pada semua (LKP) agar LKP tersebut tidak merasa didiskriminasi dan bisa terbantu dalam pengembangan kursus yang mereka selenggarakan.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Masril Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beliau mengatakan:

“.....bantuan dana dari pusat memang ada, tapi tidak semua LKP bisa mendapatkan Bantuan tersebut, bantuan lebih diutamakan untuk LKP yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah, bukan untuk yang menyelenggarakan LKP atau LKP mandiri yang hanya memperoleh izin dari kami. Namun bagi LKP mandiri yang tidak dapat bantuan masih bisa tetap jalan karena mereka masih punya penghasilan dari SPP anak atau siswa.

Hal sama pun juga diucapkan oleh Ibu Suryana Selaku Kabid Pendidikan Nonformal beliau mengatakan:

”.....Meskipun pemerintah tidak memberikan bantuan langsung pada LKP mandiri, LKP tersebut tetap saja bisa jalan karena mereka mempunyai penghasilan sendiri dari hasil uang pembayaran bulanan.

Pada kesempatan yang berbeda penulis melakukan wawancara dengan Mr. Hendra Susanto S.SS selaku pimpinan kursus Bahasa Inggris Education Center, beliau mengatakan:

“...pemerintah memang tidak memberikan bantuan langsung pada kami, tapi pemerintah tetap memberikan suport dan bantuan berupa pengadaan sarana dan prasarana, seperti kursi, dan meja belajar. Bantuan ini tidak berlaku untuk semua LKP mandiri, ini hanya diberikan berdasarkan penilaian oleh bidang sarana dan prasarana siapa yang pantas untuk diberikan bantuan.

2. Bagi petugas asesor yang mendapatkan tugas untuk melakukan penilaian langsung pada Lembaga Kursus seharusnya tidak terhalang oleh jarak tempuh yang jauh untuk mengawasi apakah LKP tersebut layak dan sesuai dengan standar kurikulum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Azra'i S.Pd selaku kasi Kurikulum dan Penilaian, beliau mengatakan:

“...meskipun kami terhambat dalam melakukan pengawasan dan penilaian oleh jarak tempuh yang jauh dikarenakan tidak ada dana operasional, kami tetap melakukan tugas kami yaitu melalui UPTD –UPTD yang berdiri untuk mewakili kami di tempat tersebut.

3. Perlunya tenaga pengajar yang berkompeten dalam mengajar ilmu Bahasa Inggris kepada anak didik, untuk itu pemerintah harus selektif dalam melakukan penilaian kinerja bagi tenaga pengajar dan memberikan standar riwayat pendidikan untuk tenaga pengajar agar bisa mengajar dengan syarat minimal lulusan S1 dan ini perlu diterapkan juga oleh LKP dalam merekrut guru.

Pada kesempatan ini penulis melakukan wawancara dengan Ms. Fitri selaku guru Bahasa Inggris di Education Center, beliau mengatakan:

“.....saya bisa diterima mengajar disini oleh Mr. Hendra karena saya lulusan S1 Bahasa Inggris Universitas Jambi, dan saya pun mengajar sesuai dengan bidang saya, untuk memberikan materi pada anak-anak, itupun sesuai dengan standar kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan Mr.Hendra Susanto S.SS selaku Pimpinan Kursus, beliau mengatakan:

“.....dalam proses rekrutmen seorang guru, sebelum menerima mereka sebagai tenaga pengajar, saya terlebih dahulu melihat kemampuannya dalam berkomunikasi Bahasa Inggris, serta riwayat pendidikannya karena saya pernah mengalami menerima seorang guru yang vokal dan pronounce nya bagus, tapi dia tidak bisa mengajar atau membagi ilmunya kepada anak didik karena disini saya lebih mengutamakan mengajar Bahasa Inggris disegi penguasaan speakingnya bukan teori, tetapi kebanyakan siswa saya belajar hanya untuk membantu menunjang nilai disekolah.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu ;

- a. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pihak kursus secara tertulis memang tidak ada, namun kerjasama yang terjalin yaitu berupa rekomendasi izin mendirikan kursus berdasarkan kepentingan bersama antara pemerintah dan pihak kursus dalam memajukan dunia pendidikan. Pemerintah daerah selaku pemberi izin bagi pihak kursus yang akan menyelenggarakan kursus. Setelah memberikan izin menyelenggarakan kursus, selanjutnya pihak dinas pendidikan akan melakukan pengawasan, penilaian, dan pemberian akreditasi pada kursus.
- b. Hambatan dalam kebijakan pemerintah daerah dalam kerjasama peningkatan kemampuan Bahasa Inggris anak didik yaitu mengenai dana, jarak tempuh, dan keterampilan dalam melakukan kerjasama.

- c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu pemerintah memberikan kesempatan yang sama pada semua lembaga kursus dalam memperoleh bantuan, bagi petugas asesor yang mendapat tugas untuk melakukan penilaian langsung berupaya tetap konsisten dalam jadwal yang sudah ditentukan, dan mengupayakan tenaga pengajar yang berkompeten serta memiliki skill yang baik dalam hal kerjasama.

Untuk pemerintah daerah (dinas pendidikan dan kebudayaan) kabupaten Bungo agar kebijakan pemerintah daerah dalam kerjasama peningkatan kemampuan Bahasa Inggris anak didik melalui lembaga kursus Bahasa Inggris lebih baik maka pemerintah harus sering melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui bahwa penting bagi mereka untuk belajar Bahasa Inggris. Selain itu, pemerintah harus mencontoh kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Pare di kampung Inggris yang sudah menjadi terkenal dan tujuan bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu Bahasa Inggrisnya dengan datang dan tinggal dalam jangka waktu yang lumayan lama disana.

#### **Ucapan Terimakasih**

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, khusus nya kepada rekan pendamping penelitian ini. Kepada ibu Nanik Istianingsih, S.E.,M.E selaku ketua LPPM yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan penelitian. Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.